

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jln. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33, Telp : (0451) 421651-421830
Palu – Sulawesi Tengah
Kode Pos 94117



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. RUSDY MASTURA
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	23,78

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.780.407.918,40	APBD
2	Program Penataan Desa	3.797.000.050	APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	267.030.100	APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.393.907.950	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	11.648.991.728	APBD

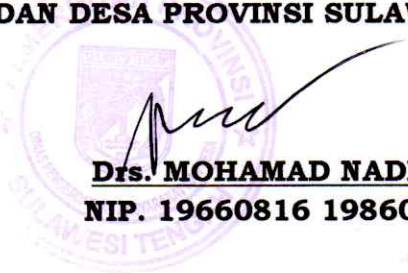
Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WARHAM LUMBENGI, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Februari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72
	a. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84
	b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	b. Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	0,7078
	c. Meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dalam Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	c. Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	100
	d. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	d. Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100
	e. Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	e. Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	100
	f. Meningkatkan Kematangan SPBE Perangkat Daerah	f. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektorat pada Perangkat Daerah	1,5
	g. Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas(ZI)	g. Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	75
	h. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum dan Tindaklanjut Laporan Pengaduan pada Perangkat Daerah	h. Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	12
	i. Meningkatkan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	i. Nilai Kepatuhan Pencatatan Barang/Jasa Pemerintah Pada SPSE	100

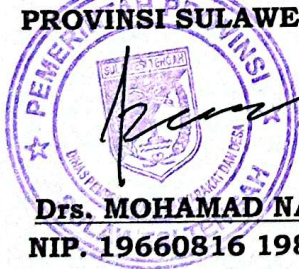
No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	j. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	j. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat daerah	1,71
	k. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	k. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat terintegrasi	88,553
	l. Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	l. Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%
	m. Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	m. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	4

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.819.776.579	APBD

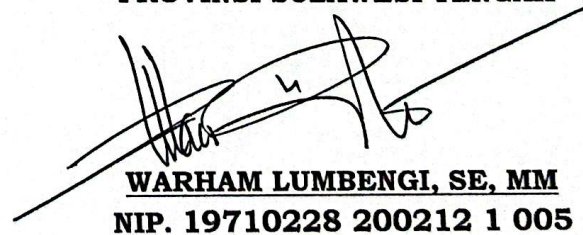
No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 283.364.450	APBD
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.574.608.141	
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 89.490.150	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 328.361.100	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 691.634.270	
	Kegiatan :Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 164.586.900	
	Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 291.431.568	
	Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 396.300.000	

Palu, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMY, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa dan Perkembangan Desa
Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Februari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN
PERKEMBANGAN DESA

EMY, S.Sos, MM
NIP. 19680628 198903 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa - Meningkatnya sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa - Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa	9,76 19

No Program

Anggaran

Keterangan

1. Program Penataan Desa

Rp. 90.000.200,-

APBD

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Rp.409.940.600,-

APBD

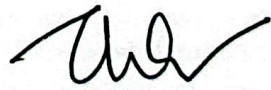
No Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan	: Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Rp. 90.000.200,-	APBD
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Rp. 90.000.200,-	APBD
2. Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.409.940.600,-	APBD
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp.184.680.200,-	APBD
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Rp. 80.000.250,-	APBD
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 95.260.150,-	APBD
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Rp. 50.000.000,-	APBD

Palu, 10 Februari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN
PERKEMBANGAN DESA


EMY, S.Sos, MM
NIP. 19680628 198903 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si
NIP. 19860519 200412 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG PEMERINTAHAN DESA

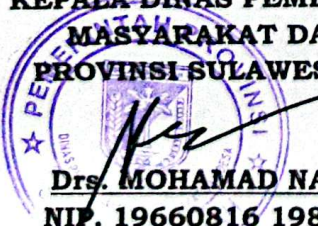
No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi - Meningkatkan sub dimensi Produk Desa	Nilai Dimensi Ekonomi - Nilai sub Dimensi Produk Desa	15,91 10
2	Meningkatnya Nilai Dimensi Lingkungan - Meningkatkan Nilai Sub Dimensi Pengelolaan Lingkungan	Nilai Dimensi Lingkungan - Nilai Sub Dimensi Pengelolaan Lingkungan - Nilai Sub Dimensi Penanggulangan Bencana	10,08 44 20
3	Meningkatnya Nilai Dimensi Aksebilitas - Meningkatkan nilai sub dimensi kondisi Akses Jalan	Nilai Dimensi Aksebilitas - Nilai sub dimensi Kondisi Akses Jalan - Kemudahan Akses	6,61 16 26
4	Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa - Meningkatkan sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa - Nilai Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa	9,76 6

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penataan Desa	Rp. 3.706.999.850,-	APBD
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 89.849.900,-	APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 516.000.250,-	APBD

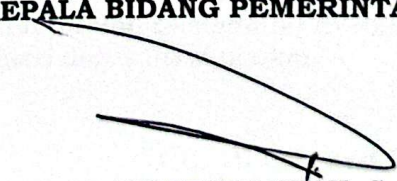
No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Rp. 3.706.999.850,-	APBD
	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Rp. 3.706.999.850,-	APBD
2	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang menjadi Kewenangan Provinsi	Rp. 89.849.900,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Rp. 89.849.900,-	APBD
3	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 516.000.250,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 95.999.800,-	APBD
	Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	RP. 100.000.200,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Rp. 165.000.150,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Rp. 85.000.000,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 70.000.100,-	APBD

Palu, 10 Februuari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA


ZENDI ALDI BUDIawan, S.STP, M.Si
NIP. 19860519 200412 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

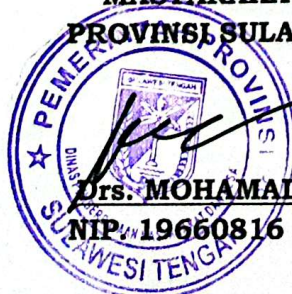
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP.)

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA

MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si
NIP. 19820527 200012 1 001

BIDANG PEMBERDAYAAN DESA

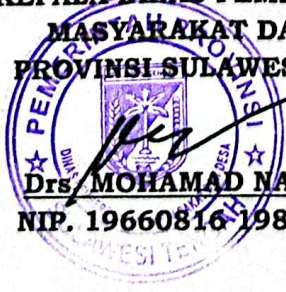
No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi - Meningkatkan Sub Dimensi Produksi Desa - Meningkatkan Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi	Nilai Dimensi Ekonomi - Nilai Sub Dimensi Produksi Desa - Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi	15,91 15 76
2.	Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa - Meningkatkan Sub Dimensi Produksi Tata Kelola Keuangan Desa	Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi	9,76 37

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp. 177.180.200,-	APBD
2	Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp. 467.967.100,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 399.027.900,-	APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan Provinsi	Rp. 177.180.200,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Rp. 89.999.950,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp. 87.180.250,-	APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
2	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 467.967.100,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Rp. 98.726.600,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab.Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Rp. 369.240.500,-	APBD
3	Kegiatan : Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 399.027.900,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp. 153.497.150,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp. 245.530.750,-	APBD

Palu, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs/MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA

MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si
NIP. 19820527 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si
NIP : 19770820 200003 2 003
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP : 19660816 198603 1 009
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN


REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si
NIP. 19770820 200003 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya nilai dimensi layanan dasar Meningkatnya Nilai Sub Dimensi Pendidikan Meningkatnya Nilai Sub Dimensi Kesehatan Meningkatnya Nilai Sub Dimensi Utilitas dasar	Nilai dimensi layanan dasar Nilai Sub Dimensi Pendidikan Nilai Sub Dimensi Kesehatan Nilai Sub Dimensi Utilitas Dasar	21,10 34 75 19
2	Meningkatnya nilai dimensi sosial - Meningkatkan Nilai Sub Dimensi Aktivitas - Meningkatkan Nilai Sub Dimensi Fasilitas Masyarakat	Nilai dimensi Sosial - Nilai Sub Dimensi Aktivitas - Nilai Sub Dimensi Fasilitas Masyarakat	9,61 41 10

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.11.648.991.728,-	APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp.11.249.963.828,-	APBD
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 263.000.160,-	APBD
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 205.005.200,-	APBD
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.9.911.539.900,-	APBD
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp. 50.000.300,-	APBD
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Rp. 50.000.268,-	APBD
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 770.418.000,-	APBD

Palu, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN


REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si
NIP. 19770820 200003 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INGE MOGA LESTARI, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kasubag Keuangan dan Asset Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : WARHAM LUMBENGI, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Dinas PMD Prov. Sulteng

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASSET


INGE MOGA LESTARI, S.Pi, M.Si
NIP. 19761005 200112 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	- Persentase bahan tanggapan dan tinjau hasil pemeriksaan yang tersusun - Jumlah laporan keuangan yang tersusun - Persentase dokumen pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM - Persentase dokumen pengusulan gaji dan tunjangan yg ditindaklanjuti menjadi SPM - Jumlah dokumen rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah	100 12 100 100 1

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.574.608.141,-	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 9.625.337.741,-	APBD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 839.250.000,-	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 110.020.400,-	APBD

**2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada
Perangkat Daerah**

Rp. 89.490.150,-

APBD

Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

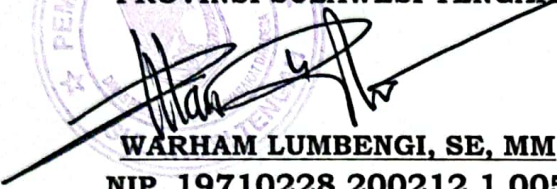
Rp. 89.490.150,-

APBD

Palu, 10 Februari 2025

Pihak Kedua

**SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASSET**


INGE MOGA LESTARI, S.Pi, M.Si
NIP. 19761005 200112 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINGGO PANDIT WARDANI, SH , M.Si
NIP : 19680828 200212 1 005
Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : WARHAM LUMBENGI, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Dinas PMD Prov. Sulteng

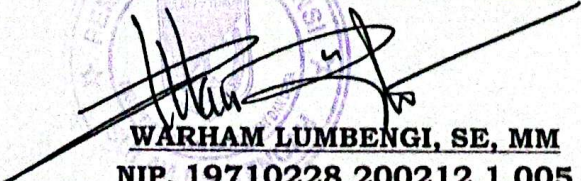
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

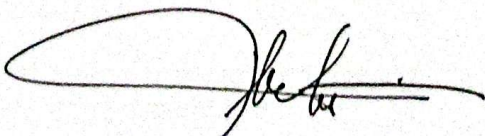
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM


LINGGO PANDIT WARDANI, SH , M.Si
NIP. 19680828 200212 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah data kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN yang terupdate - Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan - Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN berakhlak - Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi - Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap penerapan SPBE yang tersusun - Jumlah laporan data sectoral - Jumlah dokumen pemenuhan LKE Pembangunan ZI yang terkompilasi - Jumlah produk hukum yang disusun - Persentase pengaduan Masyarakat melalui SP4N lapor yang ditindaklanjuti - Jumlah laporan sistem pengadaan secara elektronik yang dimanfaatkan - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan - Jumlah laporan P3DN sesuai TKDN yang disusun	1 Laporan 50 Orang 11 Orang 33 Orang 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 12 PerBup 20 % 2 Paket 23 Unit 1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun - Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM - Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan - Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan - Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - Jumlah laporan penyelenggaraan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan - Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara - Persentase arsip dinamis berbentuk fisik dan digital yang dikelola - Presentase arsip statis yang dikelola - Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya - Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang dipelihara	1 Dokumen 1 Paket 2 Paket 4 Paket 1 Paket 12 Laporan 12 Laporan 31 Unit 4 % 4 % 20 Unit 1 Paket

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 328.361.100,-	APBD
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 54.625.000,-	APBD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 134.850.000,-	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 83.764.000,-	APBD
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. 55.122.100,-	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 691.634.270,-	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 158.548.970,-	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 50.000.000,-	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 43.085.300,-	APBD
3	Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 291.431.568,-	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Rp. 291.431.568,-	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 396.300.000,-	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 181.350.000,-	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 214.950.000,-	APBD

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 164.586.900,-	APBD
	Pengadaan Mebel	Rp. 33.058.000,-	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 131.528.900,-	APBD

Palu, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM



LINGGO PANDIT WARDANI, SH , M.Si
NIP. 19680828 200212 1 005